



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

NOMOR : 050-401.205/ 19 /2021

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN
TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun tentang Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang agar menjadikan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan tahunan.
- KETIGA** : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 5 Agustus 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN



TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 198903 1 013

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun telah tersusun. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah bekerja sama dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja Perubahan.

Rencana Kerja Perubahan dimaksud, merupakan gambaran mengenai rencana kerja yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun untuk Tahun 2021. Selanjutnya diharapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai media acuan terhadap pelaksanaan kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun ini disusun, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, 5 Agustus 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN



TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 198903 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat seluruh program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah secara terinci dan terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penekanannya adalah pada sesuatu yang akan diraih atau diperoleh pada akhir tahun anggaran.

Dengan perencanaan serta penetapan target yang akurat dan Rencana Kerja Perubahan tentunya akan mempermudah pengukuran pencapaian sasaran dan tujuan dalam akhir periode tahunan nantinya, sehingga akan mempermudah pula dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Akhirnya dapat dilihat pada tercapainya peningkatan kinerja serta terwujudnya akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja Perubahan ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai konsekuensi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka seluruh program dan kegiatan dalam Perangkat Daerah akan mengacu dan berpedoman pada Peraturan dimaksud.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Madiun Tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka sepenuhnya program dan kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada satu tahun anggaran kedepan. Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah jangka pendek (satu tahun) sebagai penjabaran dan tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2021, sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan target capaian sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Dokumen Renja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol sampai dengan Triwulan II

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol sampai dengan triwulan II dan perkiraan capaian tahun 2021.

2.2. Sasaran Kinerja Bakesbangpol

Berisikan sasaran dan indikator kinerja Bakesbangpol

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran di Tahun 2021 tidak lepas dari dukungan dana yang ada. Adapun dana yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun pada tahun 2021 sebesar Rp 6.959.584.517,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.878.064.647,00 (41,35%) dari jumlah dana tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada termasuk kegiatan rutin. Adapun Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Alokasi anggaran Rp. 30.700.000,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 29.950.000,00 atau sebesar 97,55%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi anggaran Rp. 2.887.145.114,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 1.488.166.512,00 atau sebesar 51,54%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi anggaran Rp. 524.115.753,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 183.526.324,00 atau sebesar 35,01%
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi anggaran Rp. 39.000.000,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 16.523.538,00 atau sebesar 42,36%
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Alokasi anggaran Rp. 24.892.000,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 11.989.715,00 atau sebesar 48,16%
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi anggaran Rp. 7.500.000,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 3.165.000,00 atau sebesar 42,20%
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 14.223.000,00 atau sebesar 56,89%

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Alokasi anggaran Rp. 289.298.500,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 24.385.000,00 atau sebesar 8,42%

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Alokasi anggaran Rp. 725.062.000,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 700.062.000,00 atau sebesar 96,55%

- Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Alokasi anggaran Rp. 145.996.100,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 0

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Alokasi anggaran Rp. 272.985.000,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 103.856.240,00 atau sebesar 38,04%

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

- Sub Keg Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Alokasi anggaran Rp. 95.000.000,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 1.100.000,00 atau sebesar 1,15%

- Sub Keg Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Alokasi anggaran Rp. 389.692.000,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 97.897.824,00 atau sebesar 25,12%

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Sub Keg Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Alokasi anggaran Rp. 1.503.198.050,00 realisasi sampai triwulan II Rp. 202.469.494,00 atau sebesar 13,46%

2.2 Sasaran Kinerja Bakesbangpol Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi s/d Triwulan II
1.	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan kenyamanan lingkungan	Prosentase konflik yang tertangani	100%	100%

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi s/d Triwulan II
1.	Meningkatnya partisipasi Orkemas dalam Pembangunan Daerah	Prosentase Orkemas yang berbadan hukum	68%	66%

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

2. Program Perberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di Bakesbangpol adalah pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pada Renstra Bakesbangpol Tahun 2019-2024 dan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Bakesbangpol Kota Madiun.

a. Rencana Kerja Rutin Program dan Kegiatan :

Rencana Kerja Rutin Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 3.701.735.223 terdiri dari 1 Program, 4 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran
Unsur Pemerintahan Umum		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	30.700.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.887.145.114

No	Program/Kegiatan	Anggaran
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	• Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	681.498.109
	• Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi	39.000.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.892.000
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	7.500.000
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor	25.000.000
J U M L A H		3.701.735.223

Rencana Kerja Prioritas Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 5 Program, 5 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dibutuhkan dana sebesar Rp. 3.400.424.664 dengan perincian :

No	Program/Kegiatan	Anggaran
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	• Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	265.408.050
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	725.062.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik 	145.996.100
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		
3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah 	272.985.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
4	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah 	88.383.400
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah 	448.250.250
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
5	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah 	1.454.339.864
J U M L A H		3.400.424.664

BAB IV

P E N U T U P

Penetapan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Reviu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2021 ini dan semoga Penetapan Rencana Kerja Perubahan ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Perubahan Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah	Selisih (-/+)		Program	Target						
1	8					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																			
2	8	01				URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
3	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
4	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											6,959,584,517	7,102,159,887	142,575,370						
5	8	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	12 Dokumen	21,47 Skor	A Skor	100%	12 Dokumen	21,47 Skor	30,700,000	30,700,000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	30,700,000
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	2,887,145,114	2,887,145,114	-		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	2,887,145,114
						Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	SKM Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	95,95	100%	21,47 Skor	A Skor	95,95	100%	21,47 Skor	524,115,753	681,498,109	157,382,356		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	SKM Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	95,95	100%	21,47 Skor	A Skor	95,95	100%	21,47 Skor	39,000,000	39,000,000	-		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemenuhan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas jabatan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	24,892,000	30,892,000	6,000,000		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	7,500,000	7,500,000	-		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dalam kondisi baik	Persentase sarana prasarana kantor yang layak digunakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	A Skor	100%	100%	21,47 Skor	25,000,000	25,000,000	-		Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	A Skor	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Perubahan Tahun 2021												Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah	Selisih (-/+)		Program	Target		
																					Program
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Persentase konflik yang tertangani	100%	1100 org	1100 org	100%	100%	150 org	150 org	100%	289,298,500	265,408,050	- 23,890,450		Cakupan pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik																			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	Persentase konflik yang tertangani	100%	80%	11 Parpol	100%	100%	80%	11 Parpol	100%	725,062,000	725,062,000	-		Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik	100%	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	Persentase konflik yang tertangani	100%	80%	125 org	100%	100%	80%	125 org	100%	145,996,100	145,996,100	-		Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik	100%	
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																			
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase status kelembagaan Orkemas yang berbadan hukum	Persentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persentase konflik yang tertangani	68%	75%	109 orkemas	100%	68%	75%	109 orkemas	100%	272,985,000	272,985,000	-		Persentase status kelembagaan Orkemas yang berbadan hukum	71%	
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya																			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya																			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta sosialisasi	Persentase konflik yang tertangani	100%	3 kali	100 org	100%	100%	3 kali	100 org	100%	95,000,000	88,383,400	- 6,616,600		Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Perubahan Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah	Selisih (-/+)		Program	Target	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Jumlah koordinasi	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Persentase konflik yang tertangani	100%	3 kali	200 org	100%	100%	3 kali	400 org	100%	389,692,000	448,250,250	58,558,250		Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																				
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Konflik horisontal di dalam masyarakat	Jumlah konflik	Jumlah peserta rakor	Persentase konflik yang tertangani	0 konflik	0 konflik	1055 org	100%	0 konflik	0 konflik	1055 org	100%	1,503,198,050	1,454,339,864	- 48,858,186		Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 konflik	

Catatan :

- 1 Urusan
- 2 Bidang Urusan
- 3 Program
- 4 Kegiatan
- 5 Sub. Kegiatan

Madiun, Agustus 2021
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN**

TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 198903 1 013